DARI PETRUS HINGGA BEGAL POCONG: KEKERASAN NEGARA, KRIMINALITAS JALANAN, DAN ROMANTISME DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

Erviona[1], Erniwati[2], Etmi Hardi[3]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : ervionasamsung@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji hubungan antara kekerasan negara pada era Orde Baru yang dimanifestasikan melalui Operasi Petrus (1982–1985), kondisi kriminalitas kontemporer yang ditandai oleh fenomena begal pocong (Mei 2026), dan romantisisme publik terhadap otoritarianisme di era Reformasi. Menggunakan metode penelitian studi pustaka *(library research)*, artikel ini menelusuri bagaimana kondisi kriminalitas awal 1980-an yang meresahkan melahirkan kebijakan *shock therapy* negara berupa eksekusi tanpa peradilan yang kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Di sisi lain, fenomena begal pocong yang memanfaatkan ketakutan kultural masyarakat sebagai instrumen kejahatan menjadi cerminan kegagalan struktural penegakan hukum era Reformasi yang belum terselesaikan. Dengan menerapkan teori *post-memory* Marianne Hirsch dan konsep *authoritarian nostalgia* dari Kimura et al. (2024), artikel ini berargumen bahwa romantisisme generasi Reformasi terhadap Petrus bukan merupakan kehendak akan kekerasan, melainkan ekspresi frustrasi kolektif atas demokrasi yang belum mampu menghadirkan rasa aman yang nyata. Kerinduan pada Petrus adalah ukuran dari seberapa jauh demokrasi Indonesia masih berhutang kepada warganya.

Kata Kunci : *Operasi Petrus; Begal Pocong; Post-Memory; Authoritarian Nostalgia; Kriminalitas Orde Baru*

ABSTRACT

This article examines the relationship between state violence during the New Order era as manifested through Operation Petrus (1982–1985), contemporary criminality marked by the "begal pocong" (ghost-costumed mugger) phenomenon (May 2026), and public romanticism toward authoritarianism in the Reform era. Employing a library research methodology, this article traces how the alarming criminal conditions of the early 1980s gave rise to the state's *shock therapy* policy in the form of extrajudicial killings, subsequently declared a gross human rights violation by the National Human Rights Commission (Komnas HAM). Concurrently, the begal pocong phenomenon in which perpetrators exploit deeply rooted cultural fears of the supernatural as a criminal instrument reflects the unresolved structural failures of law enforcement in the Reform era. By applying Marianne Hirsch's theory of *post-memory* and the concept of *authoritarian nostalgia* from Kimura et al. (2024), this article argues that the Reform generation's romanticism toward Petrus does not represent a genuine desire for violence, but rather a collective expression of frustration toward a democracy that has yet to deliver genuine public security. The longing for Petrus is, ultimately, a measure of how much Indonesian democracy still owes its citizens.

Keywords : *Operation Petrus; Begal Pocong; Post-Memory; Authoritarian Nostalgia; New Order Criminality*

PENDAHULUAN

Pada suatu malam di Mei 2026, seorang ibu di kawasan Tangerang memilih tidak keluar rumah untuk membeli makan karena takut bertemu pocong bersenjata celurit yang kabarnya berkeliaran di gang depan rumahnya. Di saat yang hampir bersamaan, di sebuah kolom komentar media sosial yang membahas teror tersebut, seorang warganet menulis: *"Coba kalau masih zaman Pak Harto, sudah lama beres ini."* Dua peristiwa kecil yang terjadi dalam hitungan menit di ruang-ruang yang berbeda ini diantara seorang ibu yang terkurung ketakutan dan seorang warganet yang merindukan diktator yang sesungguhnya menyimpan sebuah kisah yang jauh lebih besar dari sekadar berita kriminal dan komentar viral. Ia adalah cermin dari sebuah krisis panjang yang belum terselesaikan: krisis kepercayaan, krisis rasa aman, dan yang paling mengkhawatirkan adalah krisis memori kolektif bangsa.

Indonesia adalah sebuah negara yang menyimpan luka sejarah yang dalam namun kerap enggan dirawat dengan jujur. Salah satu luka terdalam itu adalah Operasi Petrus yaitu sebuah singkatan dari *Penembak Misterius* yang berlangsung antara 1982 hingga 1985, di mana ribuan orang, mayoritas adalah kelompok yang dicap sebagai preman atau anggota *Gabungan Anak Liar* (GALI), diculik, disiksa, dieksekusi tanpa peradilan, dan mayatnya sengaja ditinggalkan di ruang publik sebagai pesan teror yang disponsori negara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah secara resmi menetapkan bahwa operasi ini memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Presiden Joko Widodo pun pada Desember 2022 secara resmi mengakui dan menyesalkan tragedi ini sebagai salah satu dari dua belas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun pengakuan negara itu tidak lantas menghapus sebuah kenyataan yang jauh lebih kompleks: bahwa di tengah masyarakat, sebagian orang justru mengenang Petrus bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai solusi.

Fenomena kerinduan terhadap kekerasan negara di era Reformasi bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari dua dekade lebih, hidup di bawah sistem demokrasi yang meski telah memberikan kebebasan sipil yang belum pernah ada sebelumnya tetapi masih jauh dari mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan yang merata bagi seluruh warga. Ketika kriminalitas jalanan kembali merajalela dalam wujud-wujud yang semakin absurd dan berani, seperti fenomena begal pocong yang memanfaatkan ketakutan kultural untuk melancarkan aksi kejahatan, frustrasi publik mencapai titik didihnya. Dan di titik didih itulah, bayangan Petrus kembali muncul, bukan sebagai pilihan yang diinginkan dengan sadar, melainkan sebagai pelarian alam bawah sadar dari rasa aman yang tak kunjung datang.

Artikel ini berangkat dari kegelisahan akademis atas fenomena tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yang mengkaji sumber-sumber primer, karya akademik, jurnal ilmiah, serta dokumentasi media kredibel, artikel ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan besar secara berurutan. *Pertama*, bagaimana historiografi dan fakta sejarah mencatat kondisi kriminalitas awal 1980-an serta seluruh dimensi gelap Operasi Petrus sebagai respons negara? *Kedua*, bagaimana potret kriminalitas kontemporer, khususnya fenomena begal pocong di era Reformasi yang mencerminkan kegagalan struktural yang belum terselesaikan? *Ketiga*, dan ini adalah pertanyaan paling krusial, mengapa kondisi kriminalitas yang mengancam rasa aman publik di era Reformasi memunculkan romantisisme terhadap kekerasan otoritarian masa lalu, dan bagaimana mekanisme *post-memory* serta *authoritarian nostalgia* bekerja dalam membentuk romantisisme tersebut?

Relevansi pembahasan ini melampaui sekadar kepentingan akademis. Di era demokrasi yang masih rapuh, kerinduan kolektif terhadap kekerasan negara ini dilatarbelakangi oleh frustrasi yang sah adalah gejala yang perlu dibedah secara serius dan jujur. Sebab jika tidak dipahami dengan benar, ia berpotensi dimanipulasi menjadi justifikasi bagi kemunduran demokrasi yang dikemas dalam bahasa ketertiban dan keamanan. Dengan membedah hubungan antara Petrus, begal pocong, dan romantisisme publik secara berlapis, artikel ini berharap berkontribusi pada pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana sejarah kekerasan, kondisi kriminalitas kontemporer, dan psikologi kolektif saling berkelindan membentuk imajinasi politik masyarakat Indonesia pasca-Orde Baru.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka *(library research)*. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.[1] Metode ini dipilih karena kajian yang dibangun dalam artikel ini bersifat historis-analitis, di mana sumber data utamanya adalah dokumen-dokumen tertulis yang telah ada, bukan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun survei.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, **sumber primer**, yakni dokumen yang dihasilkan langsung oleh pelaku atau saksi sejarah, dalam hal ini otobiografi Soeharto berjudul *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya* (1989) yang ditulis oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., serta pemberitaan surat kabar sezaman seperti *Sinar Harapan* (1983). *Kedua*, **sumber sekunder**, yakni karya akademik, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang mengkaji peristiwa Petrus dan kriminalitas Orde Baru, di antaranya karya David Bourchier (*Crime, Law, and State Authority in Indonesia*, 1990), jurnal *Avatara* Universitas Negeri Surabaya, serta jurnal *Risalah* Universitas Negeri Yogyakarta. *Ketiga*, **sumber tersier**, yakni laporan media kredibel, dokumentasi Komnas HAM, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik yang digunakan untuk mendukung analisis kriminalitas kontemporer.

Teknik analisis data yang digunakan adalah **analisis deskriptif-interpretatif**, di mana data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka dideskripsikan secara sistematis, kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teori yang relevan yakni teori *post-memory* Marianne Hirsch (2012) dan konsep *authoritarian nostalgia* dari Kimura et al. (2024) guna membangun argumen tentang hubungan antara kekerasan negara era Orde Baru, kriminalitas kontemporer, dan romantisisme otoritarianisme di era Reformasi.[2]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kriminalitas Awal 1980-an: Premanisme dan Fenomena "Gali" yang Meresahkan

Untuk memahami mengapa pemerintah Orde Baru akhirnya memilih jalur kekerasan dalam menangani masalah keamanan, maka titik berangkat yang paling tepat adalah memotret kondisi kriminalitas Indonesia pada awal dekade 1980-an secara jujur. Periode ini bukan sekadar latar belakang biasa, ia merupakan konteks sosial yang membara, di mana ancaman terhadap keselamatan publik telah mencapai titik yang oleh banyak pihak dianggap sudah melampaui batas toleransi.

Memasuki tahun 1980, angka kriminalitas di berbagai kota besar Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan. Salah satu aktor utama di balik meningkatnya kejahatan tersebut adalah kelompok yang dikenal dengan sebutan **GALI**, akronim dari *Gabungan Anak Liar*. Istilah ini merujuk pada gerombolan anak-anak muda jalanan yang terorganisasi secara longgar namun bergerak dengan keberanian yang mengintimidasi. Fenomena GALI sebenarnya bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, ini adalah akar premanisme jalanan dan premanisme terorganisasi di kota-kota seperti Yogyakarta bahkan sudah mulai marak sejak dekade 1970-an, lengkap dengan terbentuknya bahasa tersendiri yang disebut "bahasa gali" atau "bahasa preman", yakni sebuah sandi linguistik yang lahir dari adopsi aksara Jawa *ha na ca ra ka* yang disusun secara terbalik.[1] Namun yang membedakan dekade 1980-an adalah skala dan keberanian aksi mereka yang jauh melampaui apa yang pernah terjadi sebelumnya.

Dampak dari aktivitas para gali ini tidak hanya dirasakan secara individual oleh warga yang menjadi korban, tetapi juga menyentuh sendi-sendi perekonomian masyarakat secara lebih luas. Kawasan-kawasan terminal yang dikuasai oleh kelompok gali menjadi ladang pemerasan sistematis yang membuat para pengusaha angkutan darat terus merugi. Aksi begal yang membajak bus dan truk di jalanan semakin merajalela, sementara pungutan liar menjadi praktik yang hampir tak bisa dihindari oleh siapa pun yang bersinggungan dengan wilayah kekuasaan mereka.[2] Roda perekonomian rakyat kecil, yang justru paling rentan, menjadi yang paling terdampak oleh teror jalanan ini.

Gambaran yang lebih konkret tentang betapa seriusnya situasi ini dapat dilihat dari kondisi di Surakarta. Angka kriminalitas di kota tersebut meningkat tajam pada tahun 1980, dan ulah para GALI menjadi salah satu penyumbang terbesar lonjakan tersebut. Situasinya bahkan sampai membuat Danwil 95, Kolonel Polisi FX. Yudhomo, menjuluki kota Surakarta sebagai **"Kota Neraka"** yaitu sebuah sebutan yang bukan hiperbola, melainkan cerminan dari kondisi riil yang dihadapi warga setiap harinya.[3] Tidak jauh berbeda, suasana di Yogyakarta pada masa yang sama digambarkan sebagai sangat mencekam, di mana para gali menguasai sejumlah wilayah dan beroperasi dengan rasa percaya diri yang hampir tak terbendung oleh aparat.[4]

Di balik meluasnya fenomena premanisme ini, sesungguhnya terdapat akar struktural yang jauh lebih dalam dari sekadar kenakalan atau moralitas individu. David Bourchier, dalam karya akademiknya yang menjadi rujukan penting tentang kriminalitas dan kekuasaan negara di Indonesia, menyatakan bahwa munculnya gali dan preman di kawasan pinggiran kota pada dasarnya merupakan konsekuensi langsung dari tata kelola ekonomi Orde Baru yang buruk. Sistem ekonomi yang tidak merata dan krisis finansial yang menghimpit menyebabkan gelombang kemiskinan yang luas, hingga bagi sebagian besar masyarakat marjinal, kejahatan dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar atau paling tidak, sebagai cara untuk sekadar bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi yang tak berkesudahan.[5] Dengan kata lain, para gali adalah produk dari sistem yang gagal, bukan semata-mata produk dari karakter jahat individu.

[1] Klitih, Sejarah Premanisme di Yogyakarta & Petrus," *JPNN.com*, 6 April 2022.
[2] Saat Soeharto Geram Aksi Premanisme, Muncul Sosok 'Petrus', Tiba-tiba Mayat Ditemukan Dalam Karung," *Tribun Batam*, 20 Januari 2020.
[3] Skripsi: *Gabungan Anak Liar (GALI) di Surakarta Tahun 1980–1985*, Universitas Sebelas Maret (UNS), diakses melalui digilib.uns.ac.id.
[4] Dari Petrus ke Kedung Ombo," *Historia.id*, 2023.
[5] David Bourchier, *Crime, Law, and State Authority in Indonesia* (1990), sebagaimana dikutip dalam Tempo.co, "Menilik Pembentukan Petrus, Penembakan Misterius pada Era Orde Baru," 2021.

Kondisi yang kian tidak terkendali ini pada akhirnya mendorong negara untuk merespons. Hingga tahun 1982, Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin telah melancarkan serangkaian operasi penumpasan kejahatan, mulai dari Operasi Sikat, Operasi Linggis, Operasi Pukat, Operasi Rajawali, Operasi Cerah, hingga Operasi Parkit di seluruh wilayah Indonesia, dan berhasil menangkap tidak kurang dari 1.946 orang yang diduga pelaku kejahatan.[6] Namun meski ribuan penjahat telah diringkus, angka kriminalitas tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan yang berarti. Fakta inilah yang kemudian menjadi justifikasi bagi pemerintah untuk beralih ke pendekatan yang jauh lebih ekstrem yaitu sebuah kebijakan yang tidak lagi sekadar menangkap, melainkan menghilangkan. Dari sinilah pintu menuju kebijakan *shock therapy* yang akan dibahas pada poin berikutnya mulai terbuka lebar.

Kebijakan Operasi Rahasia: *Shock Therapy* sebagai Respons Negara

Kondisi kriminalitas yang kian tak terkendali pada awal dekade 1980-an sebagaimana diuraikan di atas pada akhirnya memaksa pemerintah Orde Baru untuk keluar dari jalur hukum konvensional dan menempuh langkah yang jauh lebih radikal. Jika sebelumnya aparat keamanan masih mengandalkan mekanisme penangkapan dan peradilan, maka memasuki tahun 1982-1983 negara mulai merancang sebuah kebijakan yang sama sekali berbeda yaitu sebuah operasi yang dirancang untuk menebar ketakutan, bukan sekadar menegakkan hukum.

Perintah untuk bertindak tegas sesungguhnya telah disampaikan Soeharto secara terbuka dalam forum-forum kenegaraan. Pada Rapat Pimpinan (Rapim) ABRI tahun 1982, Soeharto secara eksplisit meminta kepada Polri yang saat itu masih menjadi bagian dari struktur ABRI untuk mengambil langkah pemberantasan yang efektif dalam upaya menekan angka kriminalitas. Keseriusan perintah tersebut bahkan diulang kembali oleh Soeharto dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 1982.[7] Dua momentum kenegaraan ini menjadi sinyal yang sangat jelas bagi jajaran militer dan kepolisian bahwa penanganan kriminalitas harus segera diintensifkan dengan cara apapun.

Respons atas perintah Soeharto tersebut tidak lama menunggu. Pangkopkamtib Laksamana Soedomo segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi bersama Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Jaya pada 19 Januari 1983. Dalam rapat itulah diputuskan untuk melancarkan sebuah operasi penumpasan kejahatan yang di Jakarta dikenal dengan nama **Operasi Clurit**, sementara di Yogyakarta dijalankan dengan nama **Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK)**.[8] Operasi ini kemudian merambat ke berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan instruksi yang sama: basmi para gali dan preman dengan cara yang "efektif", tanpa perlu terlalu terikat pada prosedur hukum yang berlaku.

Yang paling mengejutkan bukan hanya pelaksanaan operasinya, melainkan pengakuan terbuka sang penguasa atas watak sesungguhnya dari kebijakan ini. Bertahun-tahun kemudian, dalam otobiografinya yang ditulis oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., Soeharto sendiri secara terang-terangan menyebut operasi tersebut sebagai bentuk *shock therapy* atau terapi goncangan. Dalam halaman autobiografinya, ia berkata:

[6] Saat Soeharto Geram Aksi Premanisme, Muncul Sosok 'Petrus'," *Tribun Batam*, 20 Januari 2020.

[7] Pradana, "Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) dan Premanisme di Yogyakarta (1983–1985)," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

[8] Redaksi Avatara, "Penembakan Misterius (Petrus) di Jawa Timur dalam Pemberitaan Surat Kabar Surabaya Post Tahun 1983–1985," *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 13, 2025.

"Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan.. dor.. dor.. begitu saja, bukan! Yang melawan, mau tidak mau, harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak. Lalu, ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu. Maka, kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu."[9]

Kutipan di atas memperlihatkan dengan gamblang bagaimana negara secara sadar merancang teror psikologis sebagai instrumen kebijakan keamanan. Mayat-mayat yang sengaja dibiarkan tergeletak di ruang publik bukan merupakan kelalaian operasional, melainkan sebuah pesan yang dirancang dengan kalkulasi penuh bahwa negara mampu dan mau bertindak di luar batas hukum demi memulihkan ketertiban. Dalam perspektif David Bourchier, kebijakan semacam ini mencerminkan watak rezim Orde Baru yang menempatkan stabilitas keamanan di atas supremasi hukum, sebuah kecenderungan yang telah berakar sejak konsolidasi kekuasaan militer pasca-1966.[10]

Namun, tidak semua pihak menerima logika *shock therapy* ini dengan diam. Di tengah operasi yang tengah berjalan, suara kritis muncul dari kalangan hukum. Adnan Buyung Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus YLBHI, menentang keras tindakan Petrus dalam koran *Sinar Harapan* edisi 6 Mei 1983. Ia menegaskan: "Jika usaha pemberantasan kejahatan dilakukan hanya dengan main tembak tanpa melalui proses pengadilan, maka hal itu tidak menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan... Jika cara-cara seperti itu terus dilakukan, maka lebih baik lembaga pengadilan dibubarkan saja."[11] Kritik Buyung Nasution ini menjadi suara yang paling lantang dalam menolak legitimasi *shock therapy* versi Negara, sebuah penolakan yang pada saat itu hampir tidak berdaya menghadapi kekuatan rezim, namun kelak menjadi salah satu argumentasi moral paling kuat dalam mendakwa Petrus sebagai pelanggaran HAM berat. Pengakuan Soeharto dan penolakan Buyung Nasution ini bersama-sama membingkai apa yang akan dibahas lebih lanjut pada poin berikutnya: eksekusi tanpa peradilan yang menjadi wajah paling gelap dari operasi ini.

Eksekusi Tanpa Peradilan: Wajah Paling Gelap Operasi Petrus

Jika Poin B menunjukkan bagaimana negara merancang logika *shock therapy* sebagai kebijakan keamanan, maka poin ini akan memperlihatkan bagaimana logika tersebut diwujudkan di lapangan dalam bentuk yang jauh lebih brutal, sistematis, dan mengerikan dari apa yang pernah dibayangkan oleh masyarakat umum. Operasi Petrus bukan sekadar penangkapan atau penindakan hukum yang agresif; ia adalah pembunuhan yang terencana, dilakukan oleh negara, terhadap warga negaranya sendiri, tanpa sekalipun melalui meja peradilan.

Modus operandi Petrus berlangsung dalam pola yang hampir seragam di berbagai daerah. Para korban yang kebanyakan adalah lelaki berusia antara 23 hingga 52 tahun terlebih dahulu diculik oleh orang tak dikenal atau dijemput langsung oleh aparat keamanan di tengah malam. Setelah itu, mereka disiksa, lalu dieksekusi dengan berbagai cara: ditembak, ditikam, atau dicekik.

[9] G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989).

[10] David Bourchier, *Crime, Law, and State Authority in Indonesia* (1990), sebagaimana dikutip dalam Tempo.co, "Menilik Pembentukan Petrus, Penembakan Misterius pada Era Orde Baru," 2021.

[11] Adnan Buyung Nasution, dikutip dalam *Sinar Harapan*, 6 Mei 1983, sebagaimana dimuat dalam Espos.id, "Kegelapan Orde Baru, Tragedi Penembakan Misterius (Petrus) Ribuan Orang," 7 Juli 2022.

Mayat para korban kemudian tidak disembunyikan justru sebaliknya. Jenazah mereka dengan sengaja dimasukkan ke dalam karung lalu ditinggalkan di pinggir jalan, di depan rumah warga, dibuang ke sungai, ke hutan, atau ke kebun agar bisa ditemukan dan disaksikan oleh khalayak ramai.[12] Pola pembuangan mayat ini bukan kelalaian operasional ia adalah bagian dari pesan yang sengaja dirancang, persis seperti yang diakui Soeharto dalam otobiografinya.

Salah satu kesaksian paling menggetarkan tentang brutalitas modus Petrus datang dari Bathi Mulyono, seorang saksi mata yang kelak memberikan keterangan dalam diskusi yang diselenggarakan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Ia menceritakan bahwa suatu malam ia menumpang sebuah mobil bak terbuka dalam perjalanannya. Di bak belakang, ia mendapati sejumlah karung yang ternyata berisi manusia para gali yang akan dieksekusi. Pada jarak-jarak tertentu di sepanjang jalan, karung-karung itu diturunkan satu per satu, dan orang-orang di dalamnya ditembak. Bathi bercerita: "Saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana jeritan mereka, permohonan ampun mereka, yang sedemikian rupa menyayat hati... Diturunkan di pinggir jalan, dor dor dor..."[13] Kesaksian ini bukan satu-satunya ia hanya salah satu dari ratusan kisah serupa yang menggambarkan betapa rutinnya praktik pembunuhan itu berlangsung.

Dari sisi skala, angka korban Petrus hingga kini masih menjadi perdebatan karena tidak ada data resmi yang pernah diakui negara. Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM, Yosep Adi Prasetyo, memperkirakan jumlah korban mencapai **10.000 orang**, merujuk pada penelitian David Bourchier dalam *Crime, Law, and State Authority in Indonesia* (1990) yang telah diterjemahkan oleh Arief Budiman. Sementara itu, data pengaduan yang diterima Komnas HAM mencatat lebih dari **2.000 korban** yang dapat diverifikasi.[14] Kesenjangan antara dua angka ini sendiri sudah cukup menjadi cerminan betapa masifnya penghilangan paksa yang terjadi ribuan orang lenyap tanpa jejak hukum apapun.

Yang turut memperparah situasi adalah kriteria penentuan target yang sangat longgar dan rentan salah sasaran. Eksekutor Petrus menjadikan **tato** sebagai penanda utama identitas seorang gali. Sebagaimana dicatat dalam buku *Politik Jatah Preman* (2018): "Secara khusus tato yang dipandang sebagai tanda identifikasi simbolis dengan dunia gelap kejahatan dipakai untuk mengidentifikasi sasaran pengenyahan potensial."[15] Implikasinya fatal: siapa pun yang bertato, baik pelaku kejahatan maupun bukan, berpotensi menjadi target. Ketakutan ini memicu fenomena sosial yang tak kalah tragisnya ribuan orang yang memiliki tato di tubuh mereka berbondong-bondong berupaya menghapusnya dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Mereka yang mampu mendatangi klinik medis, namun yang tidak mampu menempuh cara yang jauh lebih menyiksa: menyiram tato mereka dengan air aki, atau menekankan setrika panas langsung ke kulit.[16] Tubuh

[12] Petrus, Cerita Misterius Orde Baru," *Asumsi.co*, diakses 2024; lihat juga Espos.id, "Kegelapan Orde Baru, Tragedi Penembakan Misterius (Petrus) Ribuan Orang," 7 Juli 2022.

[13] Kesaksian Bathi Mulyono dalam diskusi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, sebagaimana dimuat dalam *VOA Indonesia*, "Penembakan Misterius: Sejarah Gelap yang Tak Pernah Terungkap," 4 Februari 2022.

[14] Yosep Adi Prasetyo, Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Petrus, dikutip dalam Tempo.co, "Penembakan Misterius 1980an Ribuan Korban Jiwa," 2021; dan Kompas.com, "Komnas HAM: Petrus Termasuk Pelanggaran HAM Berat," 24 Juli 2012.

[15] *Politik Jatah Preman* (2018), dikutip dalam iNews Jatim, "Kisah Petrus yang Mencekam dan Orang-Orang yang Berebut Hapus Tato," 3 Februari 2023.

[16] "Desas-Desus Petrus, Saat Orang Hapus Tato Agar Tak Ditembak," *Good News from Indonesia*, 30 April 2021; lihat juga Merdeka.com, "Takut Jadi Korban Petrus, Saimo Setrika Tato Macan di Lengannya," 31 Agustus 2013.

mereka pun menanggung bekas luka bakar sebagai ganti dari tato yang dulu dipakai sebagai identitas sebuah gambaran yang secara fisik merepresentasikan seberapa dalam teror negara telah merasuk ke dalam kehidupan warga paling bawah.

Pada akhirnya, apa yang terjadi dalam rentang 1982–1985 itu bukan sekadar kebijakan keamanan yang kontroversial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), setelah melakukan penyelidikan panjang dari 2008 hingga 2012, secara resmi menyatakan bahwa operasi Petrus memenuhi unsur-unsur **pelanggaran HAM berat** berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yakni: pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa.[6] Pelakunya, berdasarkan keterangan para saksi, adalah unsur TNI, Polri, Garnisun, dan pejabat sipil yang bertindak di bawah koordinasi Pangkopkamtib dan komando langsung Presiden Soeharto. Fakta bahwa tidak ada satu pun pelaku yang pernah diadili hingga hari ini menjadikan Petrus sebagai salah satu luka terbuka terpanjang dalam sejarah hukum Indonesia sebuah warisan kelam yang relevansinya, sebagaimana akan dibahas pada sub-bab berikutnya, ternyata masih terasa hingga era Reformasi sekarang.

Modus Baru Kriminalitas Jalanan "Begal Pocong" Mei 2026

Empat dekade setelah Operasi Petrus menyisakan trauma kolektif yang belum tuntas, Indonesia di era Reformasi dihadapkan pada wajah kriminalitas yang sama sekali berbeda dalam kemasan, namun serupa dalam akarnya. Jika pada 1980-an teror jalanan lahir dari kemiskinan struktural yang memunculkan gerombolan gali, maka memasuki dekade 2020-an, tekanan ekonomi yang tak kunjung merata di era Reformasi melahirkan bentuk kejahatan yang jauh lebih adaptif, lebih kreatif dalam memanfaatkan celah psikologis masyarakat, dan lebih viral dalam penyebarannya. Salah satu manifestasi paling mencolok dari kecenderungan ini adalah fenomena yang kemudian dikenal luas sebagai **"begal pocong"** sebuah modus operandi kriminal yang meledak menjadi kepanikan nasional pada Mei 2026.

Gelombang keresahan ini bermula dari peredaran video-video pendek di platform TikTok dan pesan berantai di grup-grup WhatsApp yang menampilkan sosok berbalut kain putih menyerupai pocong tokoh horor paling ikonik dalam folklor masyarakat Jawa dan Sunda yang berkeliaran di gang-gang sempit pemukiman, berdiri di pinggir jalan sepi, bahkan mengetuk pintu rumah warga pada tengah malam.[17] Narasi yang menyertai konten-konten tersebut semakin lama semakin liar: pocong itu membawa senjata tajam berupa samurai, celurit, atau parang; bergerak berkelompok; dan mengincar rumah warga yang berpencahayaan minim. Laporan bermunculan dari berbagai wilayah secara hampir bersamaan Kabupaten dan Kota Tangerang, Depok, Karawang, Bekasi, Lamongan, Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga pinggiran Jakarta Barat.[18]

Yang menjadikan fenomena ini layak dikaji secara serius bukan semata pada aksi kriminalnya, melainkan pada **arsitektur psikologis** yang melatarinya. Berdasarkan investigasi awal kepolisian dari berbagai wilayah, fenomena begal pocong ini terbagi ke dalam setidaknya tiga lapisan yang saling berkelindan. Lapisan pertama adalah **modus distraksi kriminal murni**: pelaku yang mengenakan kostum pocong mendatangi rumah warga satu per satu, mengetuk pintu dengan suara keras dan berulang untuk memancing penghuni keluar, sementara kawanan yang

[17] "TEROR POCONG 2026: Bawa Sajam dan Ketuk Pintu Warga, Ternyata Ini Fakta Mengerikan di Baliknya!," *BukaMata.id*, 2026.

[18] "Teror Pocong Marak, Kisah Kelam Kolor Ijo Terulang Lagi," *BeritaSatu.com*, 24 Mei 2026; lihat juga "Teror Pocong Begal di Jateng Ternyata Hoaks, Penyebar Konten Diburu Polisi," *Merdeka.com*, 27 Mei 2026.

tersembunyi di sekitar lokasi bersiap menyergap siapa pun yang terpancing.[19] Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, secara eksplisit menegaskan bahwa pola ini sengaja dirancang untuk memanfaatkan ketakutan warga: "Kalau warga takut keluar rumah, ronda berhenti, jalanan sepi, itulah saatnya maling beraksi."[20] Lapisan kedua adalah **konten iseng yang berkembang menjadi hoaks berantai** sejumlah kasus terbongkar sebagai ulah remaja yang sekadar ingin viral, namun narasi yang melekat pada konten tersebut bergerak sendiri dan semakin menyeramkan di setiap rantai penerusan. Lapisan ketiga adalah **amplifikasi algoritmik media sosial**: konten yang menampilkan suasana gelap, teriakan warga, atau narasi horor lebih mudah viral karena memicu respons emosional yang kuat, sehingga platform digital secara tak langsung menjadi mesin pengeras kepanikan.[21]

Menariknya, fenomena ini bukan tanpa preseden historis dalam sejarah kriminalitas Indonesia. Pakar hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, Arief Syahrul Alam, mengingatkan bahwa pola serupa pernah terjadi dengan fenomena **"Kolor Ijo"** pada masa-masa sebelumnya di mana simbol horor lokal dimanfaatkan sebagai perisai psikologis oleh para pelaku kejahatan.[22] Apa yang membedakan begal pocong dari pendahulunya hanyalah kecepatan penyebarannya yang kini berlipat ganda berkat media sosial sebuah variabel baru yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia pada era Orde Baru.

Pada tataran yang lebih struktural, fenomena begal pocong tidak dapat dilepaskan dari konteks ketimpangan sosial-ekonomi yang menjadi warisan tidak terselesaikan dari transisi Reformasi. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Sosial dan Sains* (2025) menemukan bahwa pendidikan rendah, pengangguran, dan tekanan ekonomi adalah faktor utama yang secara konsisten mendorong perilaku kriminal di Indonesia.[23] Temuan ini diperkuat oleh penelitian lain yang membuktikan bahwa kemiskinan secara positif dan signifikan memengaruhi tingkat kejahatan, sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik selama periode 2018–2023.[24] Urbanisasi yang masif namun tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja formal telah menciptakan kantong-kantong kemiskinan urban yang menjadi lahan subur bagi munculnya kelompok-kelompok kriminal persis seperti yang terjadi pada era 1980-an, meski dengan wajah dan modus yang telah berevolusi sesuai zamannya.

Dengan demikian, begal pocong bukanlah sekadar berita kriminal yang aneh dan menggelikan. Ia adalah **simptom** dari sebuah persoalan sosial yang lebih dalam: bahwa empat dekade setelah Petrus dan lebih dari dua dekade setelah Reformasi, akar struktural yang melahirkan kriminalitas jalanan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran belum juga terpecahkan secara tuntas. Yang berubah hanyalah kostumnya, dari jaket kulit bertato hingga kain kafan putih. Kenyataan pahit inilah yang kemudian, sebagaimana akan dibahas pada poin

[19] "Bukan Makhluk Halus! Pocong Pengetuk Pintu di Karawang-Bekasi Adalah Begal Bersenjata Tajam Bergerombol," *SwaraJabar.id*, 24 Mei 2026.

[20] Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, dikutip dalam "Marak Teror Pocong Ternyata Modus Begal Menakuti Korban, Polisi Akan Hukum Berat," *Radar24.co.id*, 25 Mei 2026.

[21] "Di Balik Rekayasa 'Teror Pocong Bersajam': Modus Kriminal Baru atau Horor Digital yang Disengaja?," *BeritaMetro.id*, Mei 2026.

[22] Arief Syahrul Alam, dikutip dalam "Teror Pocong Marak, Kisah Kelam Kolor Ijo Terulang Lagi," *BeritaSatu.com*, 24 Mei 2026.

[23] Ihsan R, A., & Utami, F., "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminal di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 398–407.

[24] Penelitian faktor sosial ekonomi terhadap kriminalitas di kota metropolitan, *IPSSJ*, 2024, menggunakan data BPS periode 2018–2023.

berikutnya, memantik reaksi frustrasi kolektif masyarakat dan membuka jalan bagi munculnya kerinduan terhadap pendekatan keamanan yang jauh lebih keras.

Ketika Rasa Aman Menjadi Kemewahan

Jika pada poin sebelumnya telah diuraikan bagaimana begal pocong beroperasi sebagai modus kriminal yang memanfaatkan celah psikologis korban, maka poin ini akan melangkah lebih jauh untuk menelaah sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar aksi kejahatan itu sendiri: yakni **dampak yang ditinggalkannya pada lapisan kesadaran kolektif masyarakat**. Teror begal pocong bukan hanya menciptakan korban fisik ia menciptakan korban psikologis dalam skala yang jauh lebih masif, dan lebih dari itu, ia menjadi katalisator bagi sebuah frustrasi yang sesungguhnya telah lama mengendap dalam bawah sadar publik Indonesia terhadap sistem penegakan hukum di era Reformasi.

Dampak psikologis paling langsung dari fenomena begal pocong adalah terganggunya rasa aman masyarakat atas ruang publik, khususnya pada malam hari. Di Desa Macanan, Karanganyar, misalnya, sejumlah warga terutama perempuan dan anak-anak mengaku tidak berani lagi keluar rumah setelah matahari terbenam. Aktivitas-aktivitas malam yang sehari-hari dan tampak sepele, seperti pergi ke masjid untuk shalat Isya atau sekadar membeli makan di warung depan gang, mendadak menjadi tindakan yang terasa penuh risiko.[25] Kondisi ini, menurut perspektif psikologi sosial, merupakan manifestasi dari apa yang disebut **mass hysteria** atau histeria kolektif sebuah situasi di mana ketakutan menyebar jauh lebih cepat dibanding fakta yang dapat diverifikasi.[26] Ketika histeria kolektif berlangsung, yang terancam bukan hanya individu, melainkan fungsi sosial masyarakat itu sendiri: ronda mandek, interaksi antarwarga merenggang, dan ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama berubah menjadi wilayah yang dikuasai oleh ketakutan.

Pada dimensi yang lebih dalam, Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, memberikan analisis yang sangat tajam atas mekanisme psikologis yang bekerja di balik fenomena ini. Menurutnya, pilihan kostum pocong oleh para pelaku kejahatan bukanlah kebetulan atau sekadar kreativitas tanpa kalkulasi:

"Kemungkinan awalnya iseng saja. Namun karena keisengan itu 'menghasilkan', maka motif iseng itu bergeser menjadi 'niat kejahatan'. Sosok pocong mampu memicu rasa panik yang instan dan luar biasa di benak para pengendara. Ketakutan yang bersifat mendadak ini membuat korban kehilangan konsentrasi dan kewaspadaan dalam sekejap."[27]

Pernyataan Adrianus mengungkap sebuah realitas yang mengganggu: para pelaku kejahatan jalanan di era Reformasi ini memiliki pemahaman yang cukup canggih tentang psikologi massa masyarakat mereka sendiri. Mereka tahu persis bahwa narasi mistis tentang pocong yang telah ditanamkan dalam imajinasi kolektif sejak masa kanak-kanak jauh lebih efektif dalam melumpuhkan nalar korban daripada ancaman fisik sekalipun. Dalam kondisi terkejut menghadapi sosok pocong, otak manusia cenderung kehilangan kemampuan membaca situasi secara rasional dan di momen kekosongan nalar itulah pelaku kriminal bergerak. Ini bukan ilmu sihir; ini adalah eksploitasi sistematis atas kelemahan psikologis kolektif yang berakar dari warisan budaya dan folklore.

[25] "Viral Teror Pocong Gegerkan Desa Macanan Karanganyar," *JournalArta.com*, 2 Juni 2026.
[26] "Misteri Teror Pocong Bikin Resah di Tengah Masyarakat," *PWMU.CO*, Mei 2026.
[27] Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi FISIP UI, dikutip dalam "Bukan Cuma Konten! Kriminolog Nilai Teror Pocong Kini Bergeser Jadi Modus Kejahatan Jalanan," *JawaPos.com*, Mei 2026.

Namun dampak yang paling berbahaya dari teror semacam ini justru bukan ketakutan individualnya, melainkan **konflik horizontal** yang berpotensi dipantiknya. Dalam beberapa kasus, warga yang emosi melakukan pengejaran, penghakiman massa, hingga salah sasaran terhadap individu tertentu yang dicurigai sebagai pelaku. Fenomena main hakim sendiri ini bukan gejala baru di Indonesia. Jauh sebelum era begal pocong, praktik vigilantisme massa sudah berulang kali terjadi dan menjadi cermin dari kerapuhan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sebuah catatan dari Viva Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada merekam komentar seorang warga setelah pelaku kejahatan dibakar massa meski sudah berada di atas mobil patroli polisi: "Kalau diserahkan kepada polisi, tak lama lagi mereka akan keluar dan kembali nodong."[28] Komentar sederhana itu menyimpan kedalaman makna yang luar biasa ia adalah ekspresi paling jujur dari frustrasi masyarakat yang sudah kehilangan keyakinan bahwa hukum formal mampu memberikan keadilan.

Frustrasi ini bukan sentimen yang muncul tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari dua dekade lebih pengalaman hidup di bawah sistem hukum Reformasi yang masih jauh dari ideal. Di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin menurun, antara lain sebagai akibat dari kebijakan antikorupsi yang gagal dan lemahnya integritas aparat penegak hukum. Fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum di mana kasus yang melibatkan pejabat atau orang berpengaruh kerap mendapat perlakuan yang lebih ringan dibandingkan kasus serupa yang dilakukan rakyat biasa semakin memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi yang seharusnya menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Dalam konteks inilah teror begal pocong harus dibaca: bukan sebagai fenomena kriminal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai api yang jatuh di atas tumpukan frustrasi yang sudah lama kering.

Berlarutnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum yang tanpa ujung telah menghilangkan kepercayaan masyarakat, yang kemudian mendorong mereka untuk semakin menegasikan peran penegak hukum dan tidak percaya lagi kepada institusi pemerintahan sebuah keruntuhan kepercayaan terhadap eksistensi negara sebagai penopang demokrasi. Ketika kepercayaan itu runtuh dan teror jalanan kembali mengetuk pintu rumah warga di tengah malam, maka alam bawah sadar kolektif masyarakat mulai melakukan perbandingan sadar maupun tidak sadar antara kondisi saat ini dengan bayangan tentang masa lalu yang dianggap "lebih aman". Proses perbandingan inilah yang menjadi jembatan menuju fenomena yang akan dianalisis pada sub-bab berikutnya: lahirnya romantisisme terhadap kekerasan negara, dan mengapa kerinduan pada Petrus kembali menghantui benak sebagian masyarakat Indonesia di era demokrasi.

Mewarisi Kenangan yang Tidak Pernah Dialami

Dua sub-bab sebelumnya telah membangun sebuah kontras yang gamblang: di satu sisi, operasi Petrus yang terbukti merupakan pelanggaran HAM berat; di sisi lain, kondisi kriminalitas era Reformasi yang terus meresahkan dan menggerus kepercayaan publik terhadap hukum. Pertanyaan yang kini mendesak untuk dijawab adalah: mengapa, di tengah pengetahuan akan kekejaman Petrus yang sudah terdokumentasi dengan baik, sebagian kalangan masyarakat terutama generasi muda tetap saja mengungkapkan kerinduan terhadap "ketertiban zaman Orde Baru"? Jawabannya tidak sesederhana mengamini bahwa mereka menyukai kekerasan. Jawabannya terletak pada sebuah mekanisme psikologis-sosial yang jauh lebih rumit, yang dalam kajian ilmu memori dan trauma dikenal sebagai ***post-memory***.

[28] "Main Hakim Sendiri Sebagai Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum," *Viva Justicia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 13 Januari 2018.

Konsep *post-memory* pertama kali dirumuskan oleh Marianne Hirsch, Profesor Sastra Komparatif dan Kajian Gender di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Dalam artikel seminalnya yang terbit di jurnal *Poetics Today* (2008) dan kemudian diperluas dalam bukunya *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After Holocaust* (2012), Hirsch mendefinisikan *post-memory* sebagai:

"...the relationship of the second generation to powerful, often traumatic, experiences that preceded their births but that were nevertheless transmitted to them so deeply as to seem to constitute memories in their own right."[29]

Dengan kata lain, *post-memory* adalah kondisi di mana generasi yang **tidak mengalami langsung** sebuah peristiwa bersejarah entah itu traumatik maupun nostalgik mewarisi dan menginternalisasi peristiwa tersebut seolah-olah ia adalah ingatan mereka sendiri. Transmisi ini tidak terjadi melalui pengalaman langsung, melainkan melalui apa yang Hirsch sebut sebagai *multiply mediated images, objects, stories, behaviors, and affects* yaitu gambaran yang dimediasi berkali-kali, benda-benda peninggalan, cerita-cerita yang diwariskan, perilaku, dan afeksi yang mengalir dari dalam keluarga maupun dari kebudayaan yang lebih luas.[30] Kenangan itu terasa nyata dan emosional seperti ingatan yang dialami sendiri padahal ia hanyalah proyeksi dan imajinasi yang terbangun dari serpihan narasi orang lain.

Teori ini, yang awalnya dikembangkan Hirsch dalam konteks generasi kedua korban Holocaust, ternyata memiliki daya jangkau analitis yang sangat relevan ketika diterapkan pada konteks Indonesia pasca-Orde Baru. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik, Gen Z kelahiran 1997 hingga 2012 kini merupakan kelompok penduduk terbesar di Indonesia dengan proporsi mencapai 24,93% dari total populasi nasional. Artinya, kelompok umur yang saat ini paling dominan secara demografis adalah mereka yang lahir antara satu hingga lima belas tahun **setelah** kejatuhan Orde Baru pada 1998. Mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman hidup di bawah pemerintahan Soeharto, apalagi menyaksikan kengerian Petrus di tahun 1983–1985. Yang mereka miliki hanyalah serpihan narasi: cerita dari orang tua atau kakek-nenek tentang "zaman dulu yang aman", tayangan dokumenter, atau yang paling kuat pengaruhnya konten-konten media sosial yang menyederhanakan kompleksitas sejarah menjadi meme dan klip video yang mudah dicerna.

Fenomena inilah yang oleh Ariel Heryanto Guru Besar Studi Indonesia di Australian National University yang kemudian menjadi Profesor Emeritus di Monash University diidentifikasi sebagai "rindu Orde Baru" (*longing for the New Order*). Dalam tulisannya yang dimuat di majalah *Tempo* (2011), Heryanto mencatat betapa menariknya hasil survei Indo Barometer yang menyatakan bahwa **40,9% responden** menilai pemerintahan Orde Baru sebagai yang terbaik dari seluruh pemerintahan Indonesia, dan **40,5% responden** menganggap Soeharto sebagai presiden paling sukses dalam sejarah Indonesia.[31] Kerinduan ini, sebagaimana dianalisis Heryanto, bukan semata-mata reaksi rasional terhadap data historis, melainkan merupakan konstruksi emosional yang dibangun di atas ingatan yang telah tersaring, disederhanakan, dan diidealkan melalui jarak waktu.

[29] Marianne Hirsch, "The Generation of Postmemory," *Poetics Today*, Vol. 29, No. 1, Duke University Press, 2008, hlm. 103.

[30] Marianne Hirsch, *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After Holocaust* (New York: Columbia University Press, 2012), hlm. 5.

[31] Ariel Heryanto, "Rindu Orde Baru [Longing for The New Order]," *Tempo*, 2011; lihat juga publikasi di Research Portal, Australian National University.

Penelitian mutakhir yang lebih sistematis memperkuat analisis ini. Ehito Kimura beserta tim peneliti dari berbagai universitas, dalam studi bertajuk *"Authoritarian Nostalgia and Democratic Decline in Contemporary Indonesia"* yang diterbitkan di jurnal *Asian Studies Review* (SAGE Publications, 2024), melakukan survei mendalam tentang persepsi publik Indonesia terhadap Soeharto dan Orde Baru. Hasilnya mengungkap pola yang sangat menarik: ketika responden ditanya apa yang terlintas di benak mereka saat mendengar kata "Orde Baru", jawaban terbanyak adalah "Soeharto" (20,5%), disusul oleh "otoriter" (8,2%), "harga murah" (7%), "hidup sejahtera" (6,5%), dan "reformasi" (4,7%). Data ini memperlihatkan bahwa dalam memori kolektif yang beredar di masyarakat, Orde Baru lebih kuat diingat sebagai era kemakmuran dan keterjangkauan harga daripada sebagai era penindasan dan pelanggaran HAM sebuah distorsi memori yang secara persis cocok dengan mekanisme *post-memory* yang dirumuskan Hirsch.

Distorsi ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Narasi "lebih enak hidup di zaman Soeharto" telah secara berulang dimanfaatkan sebagai alat kampanye politik oleh para pewaris ideologi Orde Baru, yang terus menjual gaya kepemimpinan otoriter sebagai obat mujarab untuk segala masalah sosial hari ini. Narasi politik yang diulang-ulang ini, ketika bertemu dengan frustrasi nyata yang dirasakan generasi muda atas kondisi ekonomi, keamanan, dan hukum di era Reformasi, menciptakan kondisi yang sangat subur bagi tumbuhnya romantisisme otoritarian. Gejala ini bahkan dinilai oleh para analis sebagai bagian dari pola regional yang lebih luas *authoritarian nostalgia* serupa dengan kembalinya keluarga Marcos ke kekuasaan di Filipina, yang juga didukung kuat oleh generasi muda yang tidak mengalami langsung era diktator.

Yang perlu digaris bawahi dengan tegas di sini adalah bahwa kerinduan generasi muda pada "keamanan zaman Soeharto" bukan berarti mereka secara sadar mendambakan pembunuhan tanpa peradilan. Sebagaimana ditegaskan oleh mekanisme *post-memory* Hirsch, yang mereka warisi bukanlah memori utuh tentang Petrus beserta seluruh kengerian dan darahnya melainkan hanya **fragmen cerita** tentang rasa aman yang pernah ada, yang telah mengalami proses penapisan dan idealisasi. Dengan kata lain, generasi Reformasi yang merindukan Orde Baru sedang merindukan sesuatu yang **tidak pernah mereka miliki** dan yang sesungguhnya **tidak pernah semurni yang mereka bayangkan**. Inilah paradoks terbesar dari *post-memory*: kenangan yang paling kuat justru adalah kenangan tentang sesuatu yang tidak pernah dialami secara langsung. Dan paradoks inilah yang menjadi bahan bakar bagi romantisisme yang akan dibahas pada poin berikutnya.

Lahirnya Romantisisme Keamanan Instan, Ketika Frustrasi Meminjam Wajah Masa Lalu

Poin sebelumnya telah menunjukkan bagaimana mekanisme *post-memory* bekerja dalam membentuk kerinduan yang terdistorsi terhadap "ketertiban Orde Baru" di kalangan generasi yang tidak pernah mengalaminya. Namun penjelasan tentang *post-memory* saja belum cukup untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendesak: **mengapa romantisisme itu justru muncul ke permukaan ketika kondisi keamanan publik sedang memburuk?** Mengapa teror begal pocong pada Mei 2026 bukan kasus kriminal lain yang lebih serius sekalipun menjadi pemantik yang membuat sebagian masyarakat secara terbuka atau dalam diam merindukan pendekatan Petrus? Untuk menjawab ini, kita perlu melampaui teori memori dan masuk ke dalam psikologi sosial dari frustrasi kolektif dan mekanisme pelarian menuju *authoritarian nostalgia*.

Titik berangkat yang paling tepat adalah memahami bahwa romantisisme keamanan instan bukan lahir dari ruang hampa intelektual, melainkan dari pengalaman hidup sehari-hari yang melelahkan di bawah sistem hukum yang terasa lamban, tidak adil, dan tidak berpihak. Penelitian tentang vigilantisme yang diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Law and Justice* (2025)

menegaskan bahwa: fenomena vigilantisme atau main hakim sendiri dipahami sebagai bentuk pengendalian sosial informal yang muncul ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas sistem peradilan formal, dan dipicu oleh dua kelompok faktor: faktor internal berupa kemarahan kolektif dan frustrasi, serta persepsi negatif terhadap institusi hukum. Lebih jauh, penelitian tentang vigilantisme dan ketimpangan penegakan hukum menemukan bahwa: munculnya tindakan main hakim sendiri tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipicu oleh frustrasi masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap lambat dan tidak adil, terutama terhadap rakyat kecil dan dalam konteks masyarakat urban dengan ketimpangan sosial yang tinggi, masyarakat cenderung menciptakan bentuk keadilan sendiri melalui kekerasan langsung.

Dalam kerangka logika inilah, kerinduan pada Petrus harus dibaca bukan sebagai persetujuan terhadap pembunuhan tanpa peradilan, melainkan sebagai **ekspresi putus asa** dari masyarakat yang sudah kelelahan menunggu keadilan formal yang tak kunjung hadir. Ketika jalanan kembali terasa berbahaya, ketika pintu rumah diketuk di tengah malam oleh sosok berbalut kain kafan bersenjatakan celurit, dan ketika respons hukum formal terasa lambat dan gamang, maka alam bawah sadar kolektif mulai bekerja dengan logika yang sangat sederhana: *"dulu ada cara yang lebih cepat, dan cara itu berhasil."* Ini adalah apa yang oleh Marlies Hoekman (2014) disebut sebagai kondisi di mana terdapat ekspektasi terhadap keadilan yang tidak kunjung datang, sehingga menyebabkan masyarakat memilih untuk menghukum sendiri terduga pelaku karena dianggap dapat memberikan keadilan secara lebih instan sebuah kondisi yang merupakan bukti runtuhnya kredibilitas moral masyarakat dalam memandang suatu sistem hukum.

Yang membuat romantisisme ini lebih berbahaya dari sekadar frustrasi biasa adalah bahwa ia **tersambung dengan narasi historis yang telah terbukti "berhasil" dalam menurunkan angka kriminalitas** setidaknya secara statistik jangka pendek. Sebagaimana tercatat dalam Sub-bab I, operasi Petrus memang terbukti menurunkan angka kejahatan kekerasan secara dramatis dalam rentang 1983–1985. Fakta historis ini, ketika dipadukan dengan kondisi kriminalitas yang kembali meresahkan di era Reformasi, menciptakan apa yang secara sosiologis dapat disebut sebagai **bias konfirmasi historis** (*historical confirmation bias*): masyarakat yang sedang frustrasi secara selektif mengingat "keberhasilan" Petrus dalam menekan kejahatan, sementara secara sistematis mengabaikan ribuan nyawa yang hilang tanpa peradilan sebagai "biaya" dari keberhasilan tersebut. Kolumnis senior Detik.com, dalam tulisan bertajuk *"Pigai, Petrus, dan Begal Motor"* (Mei 2026), merekam realitas ini dengan jujur: *"Dalam situasi seperti ini, dorongan publik untuk tindakan keras sangat bisa dipahami"* sebuah pengakuan yang sekaligus menjadi peringatan, bahwa ketika kekerasan negara berjalan tanpa kontrol yang ketat, risiko ketidakadilan selalu ikut membesar.

Mekanisme psikologis di balik romantisisme ini semakin diperkuat oleh cara media sosial bekerja dalam era pasca-kebenaran. Ketika teror begal pocong viral, gelombang komentar yang muncul di berbagai platform tidak hanya berisi ketakutan ia juga berisi nostalgia yang diekspresikan secara terbuka: *"Coba kalau masih zaman Pak Harto, sudah lama beres ini,"* atau *"Butuh Petrus lagi nih."* Ungkapan-ungkapan semacam ini bukan merupakan pandangan minoritas yang terisolasi. Ia adalah cerminan dari sebuah sentimen yang lebih luas dan lebih dalam apa yang oleh Kimura et al. (2024) dalam riset SAGE-nya identifikasi sebagai *authoritarian nostalgia* yang terstruktur, di mana masyarakat Indonesia secara konsisten mengasosiasikan Orde Baru dengan

stabilitas dan kemakmuran, bahkan di tengah kesadaran bahwa rezim tersebut bersifat otoriter.[32] Algoritma media sosial kemudian memperparah situasi ini: konten yang memvalidasi sentimen nostalgia mendapat lebih banyak interaksi, sehingga ia terus-menerus diperkuat dan didistribusikan ulang, menciptakan sebuah gelembung persepsi di mana "Petrus berhasil" menjadi narasi yang terasa semakin dominan dan tidak terbantahkan.

Namun di sinilah letak bahaya terbesar dari romantisisme keamanan instan ini: ia membangun dirinya di atas **sebuah ilusi kausalitas yang cacat**. Kriminalitas era 1980-an dan kriminalitas era Reformasi tidak lahir dari kondisi yang sama, tidak beroperasi dalam konteks yang sama, dan karenanya tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Sebagaimana dianalisis oleh Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, kondisi begal pocong bukan hanya produk dari lemahnya penegakan hukum, melainkan juga produk dari tekanan ekonomi yang membuat sebagian orang berpikir instan dan memilih jalan pintas tanpa mempertimbangkan norma sosial di mana kemiskinan ekstrem kerap melahirkan perilaku ekstrem yang tidak rasional. Artinya, bahkan seandainya negara kembali menerapkan pendekatan Petrus hari ini, akar struktural yang melahirkan kejahatan ketimpangan ekonomi, pengangguran, kemiskinan urban tidak akan bergeser satu sentimeter pun. Yang akan terjadi hanyalah pengulangan siklus: kekerasan negara yang menekan gejala untuk sementara, tanpa menyentuh penyakit yang sesungguhnya.

Tindakan main hakim sendiri dan kerinduan terhadapnya merupakan sisi gelap dan potensi negatif dari sistem demokrasi yang inheren dalam masyarakat; ia adalah konsekuensi dari demokrasi yang tidak menegakkan hukum secara adil dan gagal mencegah kriminalitas yang marak. Dengan kata lain, romantisisme keamanan instan ala Petrus bukan solusi ia adalah **simptom dari demokrasi yang belum selesai**. Kerinduan itu lahir bukan karena masyarakat Indonesia pada dasarnya anti-demokrasi atau pro-kekerasan, melainkan karena demokrasi yang mereka jalani selama lebih dari dua dekade belum berhasil menghadirkan rasa aman yang nyata, keadilan yang merata, dan penegakan hukum yang konsisten. Selama kesenjangan antara ideal demokrasi dan realitas kehidupan sehari-hari itu terus menganga lebar, maka bayangan Petrus dengan segala kengerian yang telah diverifikasi sejarah akan terus membayang di sudut-sudut gelap imajinasi kolektif masyarakat Indonesia. Bukan sebagai cita-cita, melainkan sebagai pelarian; bukan sebagai pilihan yang diinginkan, melainkan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang fundamentally belum beres dalam bangunan demokrasi yang sedang kita huni bersama.

KESIMPULAN

Perjalanan analisis dalam artikel ini telah membawa kita melewati tiga lapisan pembahasan yang saling mengunci: dari kegelapan sejarah Operasi Petrus, ke keganjilan kriminalitas kontemporer berwajah pocong, hingga ke kedalaman psikologi kolektif yang merinduikan kekerasan di tengah demokrasi. Dari ketiga lapisan tersebut, tiga kesimpulan besar dapat ditarik.

Pertama, kondisi kriminalitas awal 1980-an yang digambarkan oleh berbagai sumber sejarah memang berada pada titik yang betul-betul mengancam. Kelompok GALI yang menguasai terminal, kawasan jalanan, dan ruang-ruang ekonomi rakyat kecil bukan sekadar gangguan keamanan biasa ia adalah krisis sosial yang berakar pada kegagalan struktural Orde Baru dalam mendistribusikan hasil pertumbuhan ekonomi secara merata. Respons negara yang kemudian lahir

[32] Ehito Kimura et al., "Authoritarian Nostalgia and Democratic Decline in Contemporary Indonesia," *Asian Studies Review*, SAGE Publications, Vol. 48, 2024.

dalam bentuk Operasi Petrus adalah sebuah pilihan yang secara taktis memang berhasil menekan angka kriminalitas dalam jangka pendek, namun secara fundamental merupakan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Pengakuan Soeharto sendiri dalam otobiografinya bahwa mayat-mayat dibiarkan tergeletak di ruang publik sebagai *shock therapy* adalah bukti yang tidak bisa dibantah bahwa negara secara sadar memilih teror sebagai instrumen kebijakan sebuah pilihan yang menempatkan stabilitas di atas nyawa manusia, dan ketertiban di atas hukum.

Kedua, fenomena begal pocong yang meledak menjadi kepanikan nasional pada Mei 2026 bukan sekadar peristiwa kriminal yang aneh dan menggelikan. Ia adalah simptom dari persoalan struktural yang jauh lebih dalam: bahwa lebih dari dua dekade setelah Reformasi, akar-akar sosial yang melahirkan kriminalitas jalanan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan lemahnya penegakan hukum belum juga terpecahkan secara tuntas. Yang berubah hanyalah kostum pelakunya, dari jaket kulit bertato di tahun 1980-an menjadi kain kafan putih di tahun 2026. Sementara itu, merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang dianggap lamban, tebang pilih, dan tidak memberikan efek jera telah menciptakan frustrasi kolektif yang menjadi bahan bakar bagi respons-respons di luar jalur hukum formal dari main hakim sendiri hingga kerinduan terhadap kekerasan negara.

Ketiga, dan inilah temuan paling krusial dari artikel ini: romantisisme publik terhadap Operasi Petrus di era Reformasi bukan merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia menyukai kekerasan atau menginginkan otoritarianisme kembali. Ia adalah manifestasi dari dua mekanisme yang bekerja secara bersamaan. Di satu sisi, mekanisme *post-memory* yang dirumuskan Marianne Hirsch menjelaskan bagaimana generasi yang lahir setelah 1998 yang kini mendominasi demografi Indonesia mewarisi fragmen narasi tentang "keamanan Orde Baru" tanpa pernah mewarisi kengerian Petrus yang menyertainya. Kenangan yang terputus ini menghasilkan idealisasi yang cacat: sebuah masa lalu yang telah dipoles dan disederhanakan hingga hanya menyisakan bayangan tentang jalan yang aman dan premanisme yang terkendali, tanpa darah dan karung goni. Di sisi lain, kondisi frustrasi yang nyata akibat lemahnya penegakan hukum di era Reformasi mengaktifkan apa yang Kimura et al. (2024) sebut sebagai *authoritarian nostalgia* kerinduan terhadap ketegasan mutlak sebagai jalan pintas menuju rasa aman yang tidak kunjung hadir melalui jalur demokratis yang panjang dan berliku.

Dari persinggungan antara ketiga temuan ini, artikel ini menawarkan sebuah tesis: **kerinduan pada Petrus adalah ukuran dari seberapa jauh demokrasi Indonesia masih berhutang kepada warganya.** Selama demokrasi belum mampu menghadirkan rasa aman yang nyata, keadilan yang dapat dirasakan oleh rakyat kecil, dan penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu, maka bayangan Petrus akan terus hidup bukan sebagai cita-cita yang diperjuangkan, melainkan sebagai hantu yang dipanggil oleh frustrasi yang tidak tersalurkan. Tugas demokrasi bukan sekadar menjamin kebebasan sipil di atas kertas, melainkan mengisi kebebasan itu dengan rasa aman yang konkret dan keadilan yang terasa sehingga warganya tidak perlu lagi meminjam wajah masa lalu yang berlumuran darah untuk membayangkan masa depan yang lebih tenteram.

Sebagai penutup, artikel ini mengakui keterbatasannya. Analisis yang dibangun di sini sepenuhnya bersandar pada sumber-sumber pustaka dan tidak mencakup penelitian lapangan yang dapat mengukur secara lebih presisi seberapa luas dan seberapa dalam romantisisme terhadap Petrus sesungguhnya mengakar di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Penelitian lanjutan khususnya yang menggunakan pendekatan etnografis atau survei opini publik yang dirancang secara khusus untuk mengukur *authoritarian nostalgia* dalam konteks kriminalitas kontemporer

sangat diperlukan untuk melengkapi dan menguji tesis yang telah dibangun dalam artikel ini. Karena pada akhirnya, memahami mengapa sebuah masyarakat yang telah memilih demokrasi masih bisa merindukan diktator adalah salah satu pekerjaan terpenting yang harus diselesaikan oleh ilmu sejarah dan ilmu sosial Indonesia hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer

Dwipayana, G., & Ramadhan, K.H. (1989). *Soeharto: Pikiran, ucapan, dan tindakan saya*. Citra Lamtoro Gung Persada.

Nasution, A.B. (1983, 6 Mei). [Pernyataan penolakan Petrus]. *Sinar Harapan*.

Buku

Bourchier, D. (1990). *Crime, law, and state authority in Indonesia*. Centre for Resource and Environmental Studies, Australian National University.

Heryanto, A. (2015). *Identitas dan kenikmatan: Politik budaya layar Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Hirsch, M. (2012). *The generation of postmemory: Writing and visual culture after the Holocaust*. Columbia University Press.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal Ilmiah

Azahwa, S., Fitri, Z.M., & Wijaya, E. (2022). Penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja polisi sebagai tantangan bagi implementasi good policing governance. *Jurnal Similia, 9*(2). Universitas Pancasila.

Hirsch, M. (2008). The generation of postmemory. *Poetics Today, 29*(1), 103–128. Duke University Press. https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019

Ihsan, R.A., & Utami, F. (2025). Pengaruh kemiskinan terhadap tingkat tindak kriminal di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Sains, 5*(3), 398–407.

Kimura, E., Istania, R., Afrimadona, Imawan, R.P., & Ramadhan, D. (2024). Authoritarian nostalgia and democratic decline in contemporary Indonesia. *Asian Studies Review, 48*. SAGE Publications. https://doi.org/10.1080/10357823.2024.1252452

Kuswandi, & Oktaviani, M.A. (2025). Analisis kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (vigilantisme) di kehidupan masyarakat. *Indonesian Journal of Law and Justice*. Pubmedia.

Pradana. (2017). Operasi pemberantasan kejahatan (OPK) dan premanisme di Yogyakarta (1983–1985). *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 4*(1). Universitas Negeri Yogyakarta.

Redaksi Avatara. (2025). Penembakan misterius (Petrus) di Jawa Timur dalam pemberitaan surat kabar Surabaya Post tahun 1983–1985. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah, 13*. Universitas Negeri Surabaya.

Artikel Ilmiah & Esai Akademik

Heryanto, A. (2011). Rindu Orde Baru [Longing for the New Order]. *Tempo*. Australian National University Research Portal.

Viva Justicia. (2018, 13 Januari). Main hakim sendiri sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. https://vivajusticia.law.ugm.ac.id

Skripsi

[Nama Penulis]. (t.t.). *Gabungan Anak Liar (GALI) di Surakarta tahun 1980–1985* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret]. Digilib UNS. https://digilib.uns.ac.id

Laporan & Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025*. BPS.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2012, 24 Juli). *Petrus termasuk pelanggaran HAM berat*. Komnas HAM.

Sumber Media Daring

BeritaMetro.id. (2026, Mei). Di balik rekayasa 'teror pocong bersajam': Modus kriminal baru atau horor digital yang disengaja? https://beritametro.id

BeritaSatu.com. (2026, 24 Mei). Teror pocong marak, kisah kelam Kolor Ijo terulang lagi. https://beritasatu.com

BukaMata.id. (2026). TEROR POCONG 2026: Bawa sajam dan ketuk pintu warga, ternyata ini fakta mengerikan di baliknya! https://bukamata.id

Detik.com. (2026, Mei). Pigai, Petrus, dan begal motor [Kolom]. https://detik.com

Espos.id. (2022, 7 Juli). Kegelapan Orde Baru, tragedi penembakan misterius (Petrus) ribuan orang. https://espos.id

Good News from Indonesia. (2021, 30 April). Desas-desus Petrus, saat orang hapus tato agar tak ditembak. https://goodnewsfromindonesia.id

Historia.id. (2023). Dari Petrus ke Kedung Ombo. https://historia.id

iNews Jatim. (2023, 3 Februari). Kisah Petrus yang mencekam dan orang-orang yang berebut hapus tato. https://jatim.inews.id

JawaPos.com. (2026, Mei). Bukan cuma konten! Kriminolog nilai teror pocong kini bergeser jadi modus kejahatan jalanan. https://jawapos.com

JournalArta.com. (2026, 2 Juni). Viral teror pocong gegerkan Desa Macanan Karanganyar. https://journalarta.com

JPNN.com. (2022, 6 April). Klitih, sejarah premanisme di Yogyakarta & Petrus. https://jpnn.com

Kompas.com. (2012, 24 Juli). Komnas HAM: Petrus termasuk pelanggaran HAM berat. https://kompas.com

Kompas.com. (2026, 26 Mei). Fenomena pocong jadi media begal hingga konten, pakar soroti krisis etika. https://kompas.com

Merdeka.com. (2013, 31 Agustus). Takut jadi korban Petrus, Saimo setrika tato macan di lengannya. https://merdeka.com

Merdeka.com. (2026, 27 Mei). Teror pocong begal di Jateng ternyata hoaks, penyebar konten diburu polisi. https://merdeka.com

PWMU.CO. (2026, Mei). Misteri teror pocong bikin resah di tengah masyarakat. https://pwmu.co

Radar24.co.id. (2026, 25 Mei). Marak teror pocong ternyata modus begal menakuti korban, polisi akan hukum berat. https://radar24.co.id

SwaraJabar.id. (2026, 24 Mei). Bukan makhluk halus! Pocong pengetuk pintu di Karawang-Bekasi adalah begal bersenjata tajam bergerombol. https://swarajabar.id

Tempo.co. (2021). Menilik pembentukan Petrus, penembakan misterius pada era Orde Baru. https://tempo.co

Tempo.co. (2021). Penembakan misterius 1980-an ribuan korban jiwa. https://tempo.co

Tribun Batam. (2020, 20 Januari). Saat Soeharto geram aksi premanisme, muncul sosok 'Petrus', tiba-tiba mayat ditemukan dalam karung. https://batam.tribunnews.com

VOA Indonesia. (2022, 4 Februari). Penembakan misterius: Sejarah gelap yang tak pernah terungkap. https://voaindonesia.com